

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntabilitas**

Secara harfiah akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2018: 27), menyatakan bahwa :

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Adisasmita (2011: 30), “Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.” Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban individu atau kelompok terhadap unit organisasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

##### **2.1.2 Kinerja**

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang berasal dari terjemahan kata *performance* dalam bahasa Inggris yang berarti prestasi atau hasil kerja. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, menyatakan bahwa “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Tim AKIP BPKP dalam Wahid (2016), menyatakan bahwa :

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang dimiliki.

Menurut Agusta (2013) menyatakan bahwa :

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan melakukan pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan kinerja periode berikutnya.

Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu prestasi maupun hasil yang telah dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja khususnya di lingkungan instansi pemerintah daerah diperlukan sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.

### **2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dari sudut pandang fungsional, Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018: 28-29) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*Process Accountability*)  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam

hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program (*Program Accountability*)  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2009: 21), dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas, yaitu :

1. Berfokus pada hasil (*outcome*)  
Akuntabilitas menggunakan patokan dari hasil yang didapatkan untuk menentukan tahap – tahap apa yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja. Kinerja suatu instansi dapat diukur dengan beberapa indikator yang berhubungan dengan akuntabilitas.
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan. Data – data dari pengukuran menggunakan tahap – tahap apa yang akan dilakukan selanjutnya.
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu. Dari tahap ini, data akan dihasilkan dengan hasil yang tetap atau tidak berubah-ubah dalam jangka pendek.
5. Melaporkan hasil (*outcome*) dan mempublikasikannya secara teratur. Dari tahap ini, dapat dilihat perubahan – perubahan yang terjadi selama periode yang berlangsung.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Wulandari (2018), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan–persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber–sumber daya yang konsisten dengan asas–asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi yang bersangkutan.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

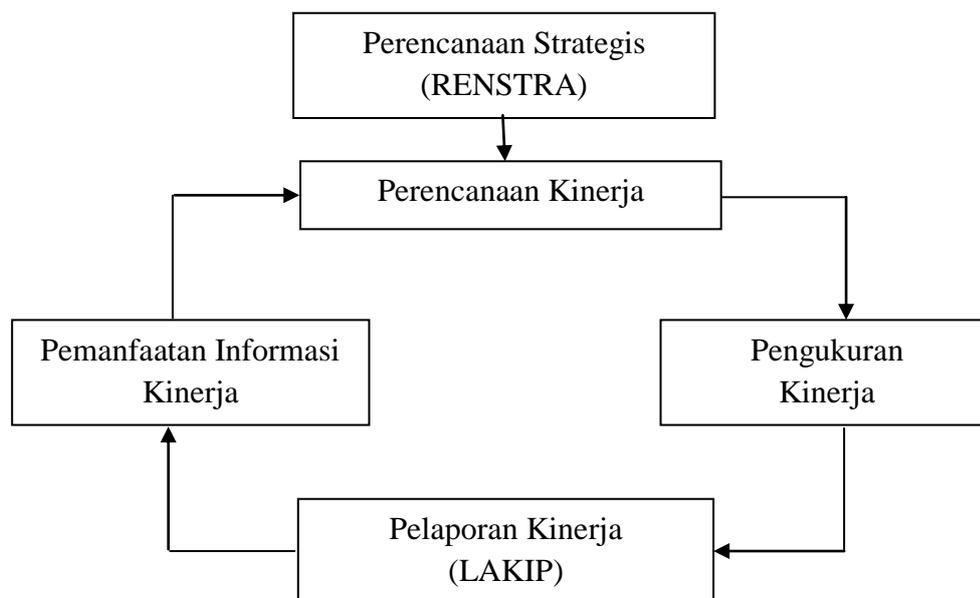
1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2011), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategis
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Pusklatwas BPKP, 2011

**Gambar 2.1**  
**Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan gambar 2.1, siklus akuntabilitas instansi pemerintah dimulai dari penyusunan perencanaan strategis (renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategis ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengumpulan dan pencatatan data kinerja dilakukan dalam melaksanakan kegiatan. Data kinerja tersebut merupakan pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Data kinerja akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen dan metode pengumpulan data kinerja. Capaian kinerja tersebut dilaporkan di akhir periode kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk LAKIP. Tahap terakhir, informasi yang termuat

dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

### **2.1.5 Anggaran**

Mardiasmo (2018:75) mendefinisikan bahwa “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Bastian (2010:191), mendefinisikan bahwa “Anggaran (*budget*) dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang akan dicapai selama periode tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran dapat dijadikan gambaran dan tolak ukur apakah pemerintah daerah telah mencapai visi dan misi organisasi pada akhir periode.

### **2.1.6 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Hidayatullah dan Herdjiono (2015) menyatakan bahwa :

Pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas kiranya memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah anggaran yang memiliki ciri yakni kejelasan sasaran anggaran, dimana kejelasan sasaran anggaran dapat memudahkan penyusunan target-target anggaran yang sesuai. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang menjadi tujuan.

Suhartono dalam Putra (2018), menjelaskan bahwa “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”. Menurut Steers dan Porter dalam Putra (2018), sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu :

- a. Sasaran harus spesifik bukan samar-samar.
- b. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik yang bertujuan agar dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaiannya. Kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Anggaran yang jelas dapat membantu para manajer (Kepala SKPD) dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengendalian sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik. Semakin tepat dalam membidik sasaran anggaran, maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja suatu instansi (Kennis dalam Putra, 2013).

Menurut Kennis dalam Kurnia dalam Septiansyah (2016) indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah :

- a. Jelas  
Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas serta tidak bermakna ganda (ambigu).
- b. Spesifik  
Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
- c. Mengerti  
Sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.

### **2.1.7 Pengendalian Akuntansi**

Menurut Damayanti dalam Putra (2018), “Pengendalian dapat diartikan sebagai suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu usaha”. Menurut Krismiaji (2010: 24), menyatakan bahwa “Pengendalian akuntansi (*accounting controls*) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan”.

Rahman dalam Setiawan (2013), menyatakan bahwa :

Sistem pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menyediakan informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif aktivitas informasi sistem. Penggunaan informasi sistem pengendalian akuntansi yang semakin tinggi akan membantu pembuatan keputusan dan kontrol organisasi dan berhubungan dengan variabel konstektual organisasi.

Menurut Abdullah dalam Anastasia (2018) dalam konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung jawab kepala daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawahnya paling sedikit mendapatkan 2 (dua) hal penting apabila menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Adapun penerapannya adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang dibuat kepala OPD.
2. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala OPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efisien dan efektif.

#### **2.1.8 Sistem Pelaporan**

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Zakiyudin & Suyanto (2015), menyatakan bahwa :

Sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja yang menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, dimana pelaporan yang baik yakni yang dibuat secara jujur, obyektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten memiliki andil besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa sistem pelaporan merupakan serangkaian prosedur yang digunakan pemerintah sebagai manajer dalam melaksanakan pertanggungjawaban. Setiap entitas pelaporan mempunyai

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode, pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja sebagaimana dijelaskan dalam kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, dan capaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan yang kelak dapat digunakan bagi yang berkepentingan untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimanfaatkan suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen LAKIP. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut LAN dan BPKP (2010), menyatakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini membuktikan bahwa sistem pelaporan yang baik sangat dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang baik khususnya dalam pengambilan keputusan.

### **2.1.9 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut William dan Sawyer yang dikutip oleh Andriani (2010), “Teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang terdiri dari perangkat lunak komputer, sistem informasi perangkat keras komputer, bahasa program, data konstruksi dan jaringan”. Teknologi informasi adalah segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diuraikan dalam tabel 2.1. tentang hasil penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Netty Herawaty (2011)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi	X1 : Kejelasan Sasaran X2 : Pengendalian Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap kehandalan struktur pengendalian.</li> <li>Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi secara parsial berpengaruh negatif dan sistem pelaporan secara</li> </ul>

				parsial berpengaruh positif.
2.	Mei Anjarwati (2012)	Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	X1 : Kejelasan Sasaran X2 : Pengendalian Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>• Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ul>
3.	Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2010)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)	X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 : Pengendalian Intern Y : Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>• Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>

4.	Angreini Pangumbalerang dan Sherly Pinatik (2014)	Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	X1 : Kejelasan Sasaran  Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	• Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5.	Reni Yulianti, Hardi, Rusli (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran  X2 : Kesulitan Sasaran Anggaran  X3 : Pengendalian Akuntansi  X4 : Sistem Pelaporan  Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	• Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6.	Afilu	Pengaruh	X1 : Kejelasan	• Kejelasan Sasaran

	Hidayatullah, Irine Herdjiono (2015)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke	Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja SKPD	Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7.	Ni Made Mega Cahyani, I Made Karya Utama (2015)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah Kota Denpasar	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan XM : Komitmen Organisasi Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	• Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan tidak terdapat pengaruh moderasi yang signifikan
8.	M. Ali Zakiyudin, Suyanto (2015)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan	X1 : Kejelasan Sasaran X2 : Pengendalian Akuntansi Pemerintahan	• Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas

		Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI	X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kinerja Instansi Pemerintah
9.	Siti Ruri Suhaesti (2016)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kabupaten Bengkalis)	X1 : Kejelasan Sasaran X2 : Pengendalian Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>
10.	Hirdri Azelya Lestari Sembiring (2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Ketidakpastian Lingkungan XM : Kinerja Manajerial Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan terdapat hubungan yang memoderasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Sistem Pelaporan berpengaruh negatif dan tidak terdapat hubungan</li> </ul>

		Manajerial Sebagai Variabel Moderasi	Pemerintah	yang memoderasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11.	Ferida Ovy Wulandari (2018)	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar)	X1 : Kejelasan Sasaran  X2 : Pengendalian Akuntansi  X3 : Sistem Pelaporan  X4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi  Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>• Pengendalian Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>
12.	Riska Dwi Fitriana, Nur Hidayati, M. Cholid Mawardi (2018)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah Kabupaten Situbondo	X1 : Kejelasan Sasaran  X2 : Pengendalian Akuntansi  X3 : Sistem Pelaporan  Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>• Kejelasan Sasaran secara parsial tidak berpengaruh</li> </ul>

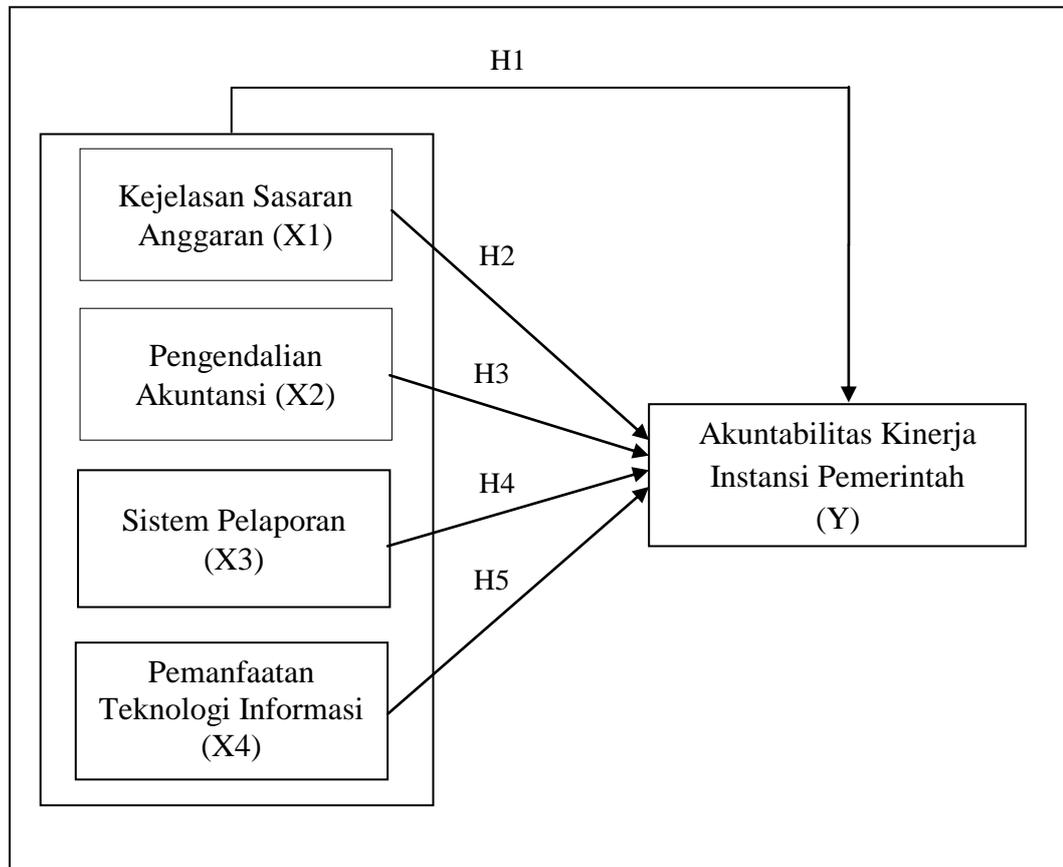
				<p>terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>
13.	Mulyadi AR, Syamsidar, Dedy Efendy (2018)	Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Aceh)	<p>X1 : Sistem Pelaporan</p> <p>X2 : Kejelasan Sasaran Anggaran</p> <p>Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah</li> </ul>

Sumber : Data yang diolah, 2019

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang telah dicantumkan dimana pada penelitian ini kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Sumber : Data yang diolah, 2019

**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar 2.2, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial maupun simultan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019: 96).

### **2.4.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sasaran anggaran yang jelas dapat mempermudah individu dalam mencapai tujuan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kinerja. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menuntut adanya pengendalian akuntansi untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam mencapai kinerja pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam mengelola data lebih cepat, efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis, yaitu :

H1 : Terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.4.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Anggaran merupakan komponen penting pada penyelenggaraan pemerintahan karena anggaran berdampak pada kinerja dalam pengelolaan keuangan yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anjarwati (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh baik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Setiawan (2013) dan Primayani (2014) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berperan besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, demikian halnya Kewo

(2014) dan Yee (2016) mengungkapkan bahwa sasaran anggaran yang jelas dapat memberi kemudahan dalam penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan organisasi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H2 : Terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.4.3 Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengendalian akuntansi suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas dari aktivitas-aktivitas organisasi (Hansen, 2012: 43). Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menuntut adanya pengendalian untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan semestinya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hidayatullah dan Herdjiono (2015) bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis, yaitu :

H3 : Terdapat pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.4.4 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Bastian (2010) mengungkapkan bahwa pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja. Herawaty (2011) dan Yulianti (2014) mengungkapkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis, yaitu :

H4 : Terdapat pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

#### **2.4.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan. Penelitian oleh Chintya (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada instansi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Adanya teknologi informasi dapat mempermudah dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi kinerja di dalam organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis, yaitu :

H5 : Terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.